

ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DENGAN TINGKAT KEMISKINAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

Nadya Sarjono¹⁾, Choirul Anwar²⁾, Darmansyah³⁾
^{1),2),3)} Universitas Pancasila

ABSTRACT

The objective of the study was to understand influence of economic growth on regional tax revenue and to identify the poverty rate as moderating variable from relation of economic growth and regional tax revenue. Data used in this study was time-series secondary data from 2011 to 2015. The data consisted of regional tax revenue, regional gross domestic product in constant price, and the poverty rate obtained from statistical Central Agency (BPS) of West Java Province.

The analysis method used Moderating Regression analysis (MRA) with the test method of interaction between independent variables and variable moderation.

The results showed that economic growth has a significant influence on local tax revenue. That results show the coefficient of determination adjusted R² of 81.6%. This means that tax revenues are influenced by economic growth, poverty, and variable interaction between economic growth and poverty variables (moderating) 81.6% and the remaining 18.4% is influenced by other factors. This study also suggest that the poverty rate variables can moderate the effect of economic growth on local tax revenue.

Keywords : Local Taxes, Economic Growth, GRDP, and Poverty.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penyumbang keuangan daerah yang cukup memiliki andil besar dalam membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan termasuk juga dalam hal pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu indikator kemandirian ekonomi suatu daerah, karena semakin tinggi penerimaan pajak suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat kemandirian dalam melaksanakan pembangunan daerahnya tanpa harus banyak bergantung pada pemerintahan pusat.

Berdasarkan Buku Jawa Barat dalam Angka 2015 (BPS Jawa Barat : 2016) Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

pada tahun anggaran 2014, mencapai 18.142,07 milyar rupiah. Pendapatan asli daerah penyumbang terbesar yaitu sebesar 13.037,56 milyar rupiah atau sekitar 71,86 persen. Komponen pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 12.215,08 milyar atau 93,69% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan 9 kota, Untuk daerah kabupaten/Kota, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan Pendapatan terbesar 4.953,13 milyar rupiah, disusul oleh Kota Bandung sebesar 4.582,50 milyar rupiah dan Kabupaten Bekasi sebesar 3.109,95 milyar rupiah.

Pendapatan asli daerah se Jawa Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2011 hingga 2015,

meskipun hanya beberapa daerah yang memiliki kenaikan yang signifikan namun secara keseluruhan sebanyak 18 kabupaten dan 9 kota mengalami kenaikan dalam hal pendapatan asli daerahnya.

Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tentu turut ditentukan oleh kondisi perekonomian di sekitarnya, karena semakin bergairah aktifitas ekonomi masyarakat maka akan menstimulus pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui aktifitas ekonominya tersebut. Ukuran dalam menentukan seberapa bergairah perekonomian bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Peacock dan wiseman (1961) menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (lihat mangkoesobroto, 1998).

Arsyad (1999:108) menyatakan pembangunan ekonomi (daerah) adalah suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah (daerah) dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk memperoleh pendapatan, dan dari pendapatan ini selanjutnya akan menimbulkan daya beli

masyarakat serta menimbulkan pasar yang cukup besar yang pada akhirnya penduduk akan memperoleh kesejahteraan (Soeroto, 1986:31).

Disisi lain kenyataannya bahwa salah satu yang akan menjadi tolok ukur bahwa pembangunan daerah telah berhasil adalah sering kali dilihat dari tingkat kemiskinan pada daerah tersebut, banyak teori mengatakan bahwa seiring dengan tumbuhnya perekonomian maka akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Akan tetapi diluar itu ada beberapa penelitian terdahulu menghasilkan bahwa meskipun perekonomian tumbuh secara positif akan tetapi tingkat kemiskinan tetap mengalami peningkatan, hal ini merupakan sebuah fenomena karena kenyataan tersebut bertentangan dengan teori-teori pembangunan, salah satunya yaitu menurut Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) yang mengartikan bahwa pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukan bahwa adanya fluktuasi naik-turun persentase kemiskinan di Jawa Barat, Penduduk miskin Tahun 2011 sebesar 11,57%, 2012 turun menjadi 9.89%, 2013 turun menjadi 9,61%, tahun 2014 turun menjadi 9,18%, tahun 2015 naik menjadi 9,57%. Naik turunnya tingkat kemiskinan selama kurun waktu 5 tahun tersebut ini menunjukkan karena adanya pergerakan ekonomi . Namun jika dibandingkan dengan progres pertumbuhan ekonomi jawa barat yang selalu mengalami kenaikan dalam kurun waktu yang sama, maka tingkat kemiskinan tidak bisa mengimbangi kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut, karena pada tahun 2015 tingkat kemiskinan masih mengalami kenaikan.

Fenomena *gap* tersebut kemudian yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui benarkah tingkat kemiskinan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa tingkat kemiskinan bisa menjadi variabel moderating dalam hubungan antara pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pajak daerah.

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pajak daerah dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel moderating belum dilakukan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian baru karena penulis menambahkan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel moderating, yang mana sebelumnya variabel tingkat kemiskinan belum pernah diteliti sebagai variabel moderating.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kebijakan fiskal dari sisi pendapatan antara lain yaitu menurut Gareth D Myles, bahwa Hamid Davoodi dan Heng Fu Zou (1998) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan di negara berkembang memiliki hubungan negatif.

Kemudian penelitian dari Afri Hidayat (2009) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi signifikan mempengaruhi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya hasil analisis secara parsial yang dilakukan oleh Dian Triastuti dan Dudi Pratomo (2015) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kemudian menurut hasil penelitian dari Rita Engleni menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Tetapi berdampak

negatif terhadap pajak hiburan. Ayu Desmawati, Zamzami dan Zulgani (2015) memperoleh hasil penelitian bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Ely Kusuma Retno meneliti pengaruh pendidikan dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian hasil analisis regresi menyimpulkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan tidak mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Terlihat ada *research gap* dalam enam hasil penelitian terdahulu diatas. dua Penelitian dari Dian Triastuti dan Dudi Pratomo (2015) dan Rita Engleni menghasilkan kesimpulan bahwa bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan empat penelitian lainnya oleh Afri Hidayat (2009), Ayu Desmawati, Zamzami, Zulgani (2015), dan Ely Kusuma Retno menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah maupun terhadap pajak daerah.

Penelitian terdahulu mengenai kemiskinan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pajak juga dibahas antara lain oleh Michael Roemer dan Mary Kay Gugerty (1997) dengan judul "*Does economic growth reduce poverty?*". Hasil penelitian tersebut adalah pertumbuhan PDRB per kapita dapat menjadi kekuatan dalam mengurangi kemiskinan.

Namun hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pada tingkat nasional dinamika tingkat kemiskinan di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa periode di mana pertumbuhan ekonomi

diwarnai dengan peningkatan kemiskinan (Sri Liani Suselo: 2008).

Abu Samman Lubis (2015) dalam Publikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penerimaan pajak tergantung pada pertumbuhan ekonomi, kalau ekonomi tumbuh/meningkat maka pajak akan meningkat. Di samping itu juga, secara umum, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Menemukan bukti empiris bahwa tingkat kemiskinan dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah.

KAJIAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Grand theory dalam Penelitian ini menggunakan Stewardship Theory, Teori stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Sedangkan menurut Etty Murwaningsari (2009) Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah selaku steward

dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi.

Termasuk dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah atau dalam penelitian ini pajak daerah. Tujuannya adalah dana dari penerimaan pajak daerah tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang mana pemerintah daerah akan merasa puas ketika pencapaian target penerimaan pajak daerah tercapai sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi bergerak tumbuh setiap tahunnya maka pemerintah sebagai *steward* akan merasa puas akan hasil pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat. Sebaliknya dengan tingkat kemiskinan, pemerintah sebagai *steward* akan merasa puas ketika tingkat kemiskinan menurun, artinya kinerja pemerintah berhasil dalam rangka memberikan kesejahteraan pada masyarakat yaitu dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

Sehingga dapat diterapkan dalam model penelitian ini semua variabel yaitu penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan secara keseluruhan dapat mencakup kedalam teori *Stewardship*. Menurut Putro (2013) teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2013:13), yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat

dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor - faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009: 237).

Konsep dan Definisi Kemiskinan

Pengertian Miskin adalah kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang/rumahtangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/layak bagi kehidupannya. (Bappeda : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Semester 1). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut." Soerjono Soekanto, (1982, Sosiologi: suatu Pengantar, Rajawali Press).

Kerangka Pemikiran

Dari berbagai literatur dan hasil penelitian tentang pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, Kajian literatur dan hasil penelitian tersebut menjadi landasan teori bagi penelitian untuk mengembangkan kerangka pemikiran dalam penelitian. Mengembangkan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dalam model ini merupakan variabel independen, sedangkan penerimaan pajak daerah adalah variabel dependen serta tingkat kemiskinan adalah sebagai variabel moderating.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan Penelitian dari Afri Hidayat (2009) menyimpulkan bahwa

Pertumbuhan Ekonomi signifikan mempengaruhi Pajak Daerah. Kemudian menurut Nurcholis Hanif (2015:177) menjelaskan bahwa jika Produk Domestik Bruto (PDRB) suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak (*ability to pay*) juga akan meningkat.

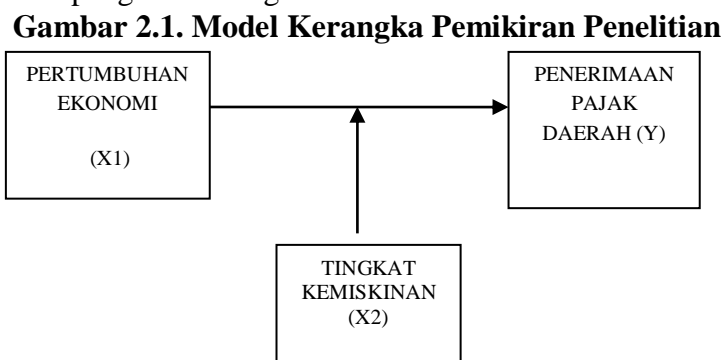
Dengan kata lain jika ekonomi tumbuh maka akan banyak objek-objek dan subjek pajak yang akan memiliki kewajiban dalam membayar pajak kepada pemerintah setempat. Keadaan tersebut dapat menguntungkan pemerintah dalam hal peningkatan sumber pendapatan pemerintah daerah.

Tingkat Kemiskinan dapat Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian dari Teguh Anshori mengenai pengaruh tingkat

kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi menyimpulkan hasil bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Artinya semakin rendah tingkat kemiskinan maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga kerangka pemikirannya adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan penerimaan pajak yang mana kejadian tersebut dapat saja dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya penulis beranggapan bahwa tingkat kemiskinan tersebut dapat memperkuat atau dapat memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah.

Dari hubungan tersebut dapat dijelaskan model kerangka pemikiran penelitian ini pada gambar 2.1. berikut ini :



Hipotesis Penelitian

- H1 : Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap Penerimaan Pajak Daerah
- H2 : Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah di moderasi oleh Tingkat Kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Desain Riset

Penelitian ini menggambarkan studi dokumen observasi dan dari berbagai sumber melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari beberapa literatur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian

ini, baik artikel ilmiah maupun data laporan. Sumber dan jenis data merupakan data sekunder antara lain diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Jawa Barat (<http://jabar.bps.go.id>) dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui (www.djpk.depkeu.go.id). Data sekunder tersebut untuk memenuhi variabel yang diteliti yaitu data penerimaan pajak daerah dan PDRB serta tingkat kemiskinan. Adapun subyek yang akan diteliti adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat berjumlah 18 kabupaten dan 9 kota.

Definisi Operasionalisasi Variabel

Tabel 1
Tabel Operasional Variabel

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Rujukan
1.	Variabel Y Pajak Daerah	Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.	Jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2011-2015. Dalam jutaan rupiah.	Rasio	Dian Triastuti, Dudi Pratomo
2.	Variabel X Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan total output yang dihasilkan oleh suatu negara dari tahun ke tahun yang di Proxy dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku (dalam milyar rupiah).	PDRB atas dasar harga berlaku periode tahun 2011-2015	Rasio	Eva Susanti (2008)
3.	Variabel Moderating : X4 : Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga	Tingkat kemiskinan (K) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan	Rasio	Teguh Anshori (2013)

		mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut." Soerjono Soekanto, (1982, Sosiologi: suatu Pengantar, Rajawali Press)	di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015 (dalam satuan persen), Data diambil dari BPS Jawa Barat		
--	--	---	--	--	--

Teknik Analisa Data

Analisa Regresi Moderating

Metode yang dipakai dalam menganalisis variabel-variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu aplikasi khusus regresi linear berganda dimana mengandung unsur interaksi persamaan regresi (perkalian dua atau lebih variabel independen). MRA ini dilakukan melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik), dengan ketentuan sebagai berikut:

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Anova atau *F test* misal menghasilkan nilai F hitung dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y, atau dapat dikatakan bahwa variabel X1, variabel X2,

dan variabel moderat (interaksi antara X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Dari ke tiga variabel independen (variabel X1, variabel X2, dan variabel moderat) yang dimasukkan dalam regresi, jika variabel X1, variabel X2, dan variabel moderat (interaksi antara X1 dan X2) memberikan nilai koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 adalah variabel *moderating*. Jika variabel moderat mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 bukan merupakan variabel *moderating*. Adapun kriteria dalam analisa regresi moderasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Kriteria Jenis Moderasi

No	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1.	b_2 non significant b_3 significant	Moderasi Murni (<i>Pure Moderator</i>)
2	b_2 significant b_3 significant	Moderasi Semu (<i>Quasi Moderator</i>). Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang

		sekaligus menjadi variabel independen.
3.	b ₂ significant b ₃ non significant	Prediktor Moderasi (<i>Predictor Moderasi Variabel</i>). Artinya variabel moderasi ini hanya berperanan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk
4.	b ₂ non significant b ₃ non significant	Moderasi Potensial (<i>Homologiser Moderator</i>). Artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi.

Sumber : Sharma (1981) dalam Ghozali (2011:224)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan *One Sample Kolmogroff-Smirnov Test* diperoleh nilai KS sebesar 1,328 dan signifikan sebesar 0,059 atau lebih besar dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas dilihat bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB), Tingkat Kemiskinan, dan Variabel interaksi Moderating memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.**

Uji Heteroskedastistas

Berdasarkan hasil uji hipotesis maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut :

1. Persamaan Regresi Model 1

$$Y = 164.573.581.000 + 7.000X_1 + e$$

2. Persamaan Regresi Model 2 (MRA)

$$Y = 164.573.581.000 + 7.000X_1 - 14.338.425.000X_2 + 0X_1*X_2 + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut :

1. Jika Pertumbuhan Ekonomi (X₁) mengalami kenaikan satu satuan, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar Rp.7.000
2. Jika Tingkat kemiskinan (X₂) mengalami penurunan satu satuan, maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 14.338.425.000
3. Jika interaksi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan (X₁*X₂) mengalami kenaikan satu satuan, maka penerimaan pajak (Y) akan bernilai sebesar nilai konstanta yaitu Rp. 164.573.581.000

Melihat hasil uji heteroskedastistas dengan menggunakan uji glesjer diatas, Tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X₁ sebesar 0.00 artinya terjadi heteroskedastistas. Sementara itu untuk variabel X₂ dan Moderat (X₃) masing-masing memiliki nilai signifikansi 0.13 dan 0.25 artinya tidak terjadi heteroskedastistas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji Autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,783. Didapat nilai dl 1,659 dan du 1757 untuk n = 125 dan k = 3. Oleh karena DW hitung > du dan < 4 - du, berarti tidak ada autokorelasi antar residual.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dari output hasil uji statistik F dapat diperoleh nilai probabilitas (F hitung) sebesar 184,632 dan signifikan pada 0,000. Kemudian diperoleh F tabel sebesar 2,70 untuk $n=125$ dan $k=3$. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu Pajak Daerah.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Hasil Uji t statistik dengan menggunakan SPSS 20 menunjukkan bahwa t hitung variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 9,517. Sementara t tabel didapatkan sebesar 1,979 (yaitu dari $n=125$ dan $k=3$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $9,517 > 1,979$. Artinya Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya hasil uji t terhadap variabel kemiskinan yaitu t hitung sebesar -2,805. Sementara t tabel menunjukkan angka 1,979 (yaitu dari $n=125$ dan $k=3$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2,805 > 1,979$. Arah angka menunjukkan tanda negatif ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah artinya semakin rendah tingkat kemiskinan maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak daerah dan sebaliknya semakin tinggi tingkat kemiskinan maka akan semakin menurunkan penerimaan pajak daerah.

Uji Moderating Regression Analysis (MRA)

Dari hasil output tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa Variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi) memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.007 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($<0,05$).

Variabel X2 memberikan nilai koefisien parameter sebesar -14338,425 dengan tingkat signifikansi 0,006 ($<0,05$). Variabel moderat memberikan nilai koefisien parameter sebesar 0.000 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009 ($<0,05$). Variabel moderat yang merupakan interaksi antara X1 dan X2 ternyata signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 merupakan variabel *moderating*.

Akan tetapi jika dilihat dari nilai signifikansi baik untuk variabel X2 maupun variabel moderat (X3), keduanya bernilai signifikan maka berdasarkan tabel kriteria Variabel Moderating, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kemiskinan adalah termasuk kedalam Moderasi Semu (*Quasi Moderator*). Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen (Sharma :1981 dalam Ghazali (2011:224)).

Dengan begitu hasil penelitian ini menemukan secara empiris bahwa Variabel tingkat kemiskinan dapat memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah, selain itu variabel tingkat kemiskinan dapat pula menjadi variabel independen. Sehingga variabel tingkat kemiskinan ini memiliki dua fungsi yaitu sebagai variabel moderasi dan juga bisa menjadi variabel independen.

Koefisien Determinasi

Output SPSS pada Koefisien Determinasi menunjukkan besarnya adjusted R^2 sebesar 0,816 hal ini berarti 81,6% variasi Pajak Daerah yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Variabel Tingkat Kemiskinan, dan variabel Moderat (Pertumbuhan Ekonomi x Tingkat Kemiskinan) Sisanya ($100\% - 81,6\% = 18,4\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan mengenai hasil penelitian terhadap uji hipotesis dapat disajikan sebagai berikut :

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas membuktikan secara empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afri Hidayat (2009) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi signifikan mempengaruhi Pajak Daerah. Ayu Desmawati, Zamzami dan Zulgani (2015) memperoleh hasil penelitian bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Ari Dwi Wulandari (2009) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kemudian hasil penelitian Priyo Hari Adi (2006) menunjukkan bahwa belanja pembangunan daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Serta Rita Engleni turut menghasilkan penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap beberapa komponen pajak daerah.

Secara keseluruhan kelima hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerahnya.

Hasil penelitian ini pula sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan wiseman (1961) yang menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat.

Selanjutnya temuan penelitian ini konsisten dengan Saragih (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD (termasuk Pajak Daerah) sebenarnya

merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga sejalan dengan Abu Samman Lubis (2015) dalam Publikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan yang mengemukakan bahwa penerimaan pajak tergantung pada pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi tumbuh/meningkat maka pajak akan meningkat.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Triastuti dan Dudi Pratomo (2015), Dzingirai Canicio dan Tambudzai Zachary (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Namun hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan karena hasil penelitian ini merupakan hasil empiris terbaru yang menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka pemerintah daerah di kawasan Provinsi Jawa Barat harus lebih memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerahnya. Kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan daerah akan sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya perekonomian daerah, dengan tumbuhnya suatu daerah maka sesuai dengan hasil penelitian ini kondisi perekonomian yang tumbuh akan memberikan dampak kepada meningkatnya penerimaan pajak daerah.

Sehingga penting bagi pemangku kebijakan pada tiap-tiap daerah untuk lebih sensitif dalam melihat mengenai daerah mana yang menjadi prioritas dalam pembangunan agar angka pertumbuhan ekonomi bergerak naik dan berimbas kepada peningkatan kemampuan daerah tersebut untuk menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal melalui pajak daerah khususnya.

Tingkat Kemiskinan Dapat Memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil daripada Uji *Moderating Regression Analisis* (MRA). Didapatkan hasil bahwa tingkat kemiskinan merupakan variabel moderasi. Yakni tingkat kemiskinan dapat menguatkan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak. Artinya semakin rendah tingkat kemiskinan maka akan semakin menguatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah tentu diperlukan adanya stimulus makro ekonomi seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga terjaganya tingkat kemiskinan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Sehingga penting bagi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah, perlu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yaitu dengan cara membuat kebijakan yang tepat terhadap pembangunan daerah-daerah yang masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah sehingga jika daerah tersebut diprioritaskan dalam pembangunannya hingga daerah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhannya maka timbal baliknya adalah daerah tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan pajak daerahnya.

Selain fungsinya sebagai variabel moderator, Tingkat Kemiskinan juga berfungsi sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan merupakan variabel independen, yakni hasil penelitian Iwan Handoko dkk berhasil menjelaskan bahwa Tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif

terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara tingkat kemiskinan terhadap penerimaan pajak mengindikasikan bahwasannya penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan di Indonesia.

Ketika tingkat kemiskinan semakin meningkat maka perekonomian menunjukkan semakin lemahnya daya beli masyarakat. Melemahnya daya beli dan penghasilan ini tentunya akan berdampak terhadap penerimaan negara dalam bentuk pajak. Seperti yang dihasilkan dalam penelitian sebelumnya oleh Michael Roemer dan Mary Kay Gugerty (1997) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita dapat menjadi kekuatan dalam mengurangi kemiskinan. Artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun. Sebaliknya jika tingkat kemiskinan tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan menurun.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh sebesar 81,6% terhadap penerimaan pajak daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah dapat diperkuat oleh tingkat kemiskinan yang rendah dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah dapat diperlemah oleh tingkat kemiskinan yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesimpulannya bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini dapat diterima. Dengan begitu hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu maupun dengan teori yang ada. Beberapa penelitian terdahulu oleh Afri Hidayat (2009), Ayu Desmawati dkk (2015), dan Rita Engleni menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerahnya.

Kemudian hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Samman Lubis (2015) dalam Publikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan yang mengemukakan bahwa penerimaan pajak tergantung pada pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi tumbuh/meningkat maka pajak akan meningkat.

Tingkat Kemiskinan dapat memoderasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah.

Dalam penelitian ini telah membuktikan dua hal yang juga dapat ditarik sebagai kesimpulan yaitu yang pertama bahwa tingkat kemiskinan dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. Kedua, variabel tingkat kemiskinan juga dapat berfungsi sebagai variabel independen sekaligus. Atau dalam istilah penelitian, tingkat kemiskinan dapat disebut sebagai variabel Moderasi Semu (Quasi Moderator), yaitu variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen (Sharma :1981 dalam Ghazali 2011:224).

Dengan demikian maka hipotesis 2 juga dapat diterima bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di moderasi oleh tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sarbini dan Taufik Edy Susanto. 2015. *Statistika Tanpa Stress*. Cetakan Pertama. Penerbit Transmedia : Jakarta.
- Anida Gree Sitorus, Ester dan Marisa Kusuma Putri, 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota Jawa Barat 2016*, Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat.
- Anshori Teguh. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tenaga Kerja Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2010. *Skripsi*. Universitas Muhamadiyah Surakarta
- Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2013. *Kompilasi dan Analisis PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2011-2012*, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2012. *Jawa Barat dalam Angka/Jawa Barat in Figure 2011*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- B.Ilyas Wirawan, Suhartono Rudy, 2013. *Perpajakan (Pembahasan lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru)*. Mitra Wacana Media : Jakarta
- BPS Provinsi Jawa Barat , *Konstruksi dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2015*, 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- BPS Provinsi Jawa Barat , *Jawa Barat dalam Angka/ Jawa Barat in Figure 2015*, 2016. Badan Pusat

- Statistik Provinsi Jawa Barat, Bandung.
- Canicio Dzingirai, Tambudzai Zachary. 2014. *Causal Relationship between Government Tax Revenue Growth and Economic Growth: A Case of Zimbabwe (1980-2012)*. Journal of Economics and Sustainable Development. Vol.5, No.17. Midlands State University, Zimbabwe.
- Desmawati, Ayu dkk, 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 1, Jambi.
- Dwi Wulandari, Ari, 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Pada Kabupaten/ Kota Di Propinsi D.I. Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Engleni, Rita, 2001. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah yang Berbasis Konsumsi di Kota Padang*, Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ghazali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, Afri, 2009. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Sumatera.
- Jonathan Houghton, Shahidur R. Khandker. 2012. *World Bank, Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Kusuma Ely Retno. 2012. *Pengaruh Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal. Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya.
- Liani Suselo Sri, Tarsidin. 2008. *Kemiskinan Di Indonesia: Pengaruh Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Ekonomi*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2008.
- Liana Lie. 2009. *Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XIV, No.2. Universitas Stikubank Semarang.
- Maipita Indra dkk. 2010. *Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Dan Angka Kemiskinan Di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Myles Gareth D. 2000. *Taxation and Economic Growth*. *Fiscal Studies* (2000) vol. 21, no. 1, pp. 141–168. University of Exeter.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, 2010. *Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Pajak Daerah*, Bogor : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
- Pujiati, Amin. 2006. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang di Era Desentralisasi*

- Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.13 No. 2, 2008.*
- Rupali Epi. 2010. *Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang Pajak Daerah.* Dinas Pendapatan Daerah, Bogor.
- Roomer Michael and Mary Kay Gugerty, 1997. *Does Economic Growth Reduce Poverty?*, CAER II Discussion Paper No. 5. Harvard Institute for International Development : Cambridge USA.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah,* Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,* Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Cetakan Pertama. Penerbit GhaliaIndonesia: Jakarta.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Bisnis,* Cetakan kesembilan, Alfabeta, Bandung.
- Statistik Sosial dan Kependudukan. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Persen), 2002-2014.*
[http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/122.](http://jabar.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/122)
- Triastuti, Dian dan Dudi Pratomo, 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2007-2014).* Jurnal. Universitas Telkom, Bandung.
- Tim Dosen Pembimbing Tesis, 2014. *Pedoman Penulisan Tesis,* Jakarta : Magister Akuntansi Universitas Pancasila.
www.spssindonesia.com